PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT
JalanH.M. Rafi'i No. 16PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
☎Telp. (0532) 24475-24476 Fax. (0532) 24475

Pangkalan Bun, Juli 2020

Nomor : 700/ /LHE/2020/ITKAB
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Konsep Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Kepada :
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaraingin Barat

di
Pangkalan Bun

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/69/STP/VI/2020, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

d. Memonitor tindaklanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol yang meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja,yaitu:Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

   Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, memperoleh nilai sebesar 71,08 dengan kategori **BB** (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal), namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan :

No	Uraian	Bobot	Nilai	%-tase
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,63	85,42
2	Pengukuran Kinerja	25,00	18,75	75,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,86	79,07
4	Evaluasi Kinerja	10,00	5,29	52,85
5	Capaian Kinerja	20,00	9,56	47,81
	JUMLAH	**100,00**	**71,08**	**71,08**

4. Hasil penilaan BB tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, meskipun begitu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang sangat penting yaitu:

   a. Perencanaan Kinerja

1) Implementasi renstra

Perencanaan strategis telah dituangkan pada dokumen renstra atas capaian jangka menengah sampai dengan tahun berjalan, evaluasi dan monitoring secara periodik belum dilakukan oleh penanggungjawab.

2) Implementasi perencanaan kinerja tahunan pada :

a) Hasil evaluasi atas rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran diketahui pengajuan anggaran tidak mempersyaratkan rencana kinerja tahunan.

b) Hasil evaluasi atas target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, diketahui belum ada bukti yang cukup bahwa PK yg ditandatangani dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang berkinerja dan sebagai dasar pemberian *reward*.

c) Hasil evaluasi atas rencana aksi Kinerja diketahui sebatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja. Belum dijadikan bahan monitoring dan evaluasi progres capaian rencana aksi secara periodik.

b. Pengukuran Kinerja.

1) Hasil evaluasi atas pemenuhan pengukuran kinerja diketahui *mekanisme pengumpulan data kinerja telah* dilaksanakan (SOP telah dibuat), namun masih terdapat data pengukuran capaian kinerja yang tidak sesuai yaitu OPD perlu menyusun SOP jika terjadi ketidaksesuain data kinerja, verifikasi dan validasi data kinerja.

2) Hasil evaluasi atas Implementasi Pengukuran Kinerja poin hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat

eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment, dari hasil evaluasi belum dilakukan pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas yg dikaitkan/sebagai dasar pemberian reward & punishmen.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjiP) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

1) Hasil evaluasi atas Penyajian informasi kinerja diketahui Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi sumber daya

2) Penyajian laporan kinerja belum menginformasikan evaluasi atas capaian kinerja jangka menengah sebagai dasar peningkatan penguatan kinerja untuk mencapai kinerja organisasi.

d. Evaluasi Kinerja

1) Pemenuhan evaluasi

a) Hasil evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi diketahui belum menganislis tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda.

b) Hasil evaluasi belum disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Kualitas evaluasi

a) Hasil evalusi atas evaluasi program diketahui bahwa evaluasi program belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.

b) Hasil evaluasi atas pemantauan rencana aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, diketahui belum ada penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan tidak ada alternatif yang diberikan.

c) Hasil evaluasi atas Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode, diketahui bahwa rencana aksi yang dibuat belum menginformasikan perbaikan setiap periodenya.

3) Evaluasi kinerja atas program dan rencana aksi belum dimanfaatkan oleh OPD. Belum mengakomodir perbaikan program dimasa yang akan datang dan evaluasi atas rencana aksi tidak ada tindaklanjut dalam bentuk langkah nyata.

e. Capaian Kinerja

Pelaksanaan SAKIP sudah mulai mendorong unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pengukuran capaian hasil *(outcome)*, namun masih perlu dilakukan peningkatan atas capaian hasil *(outcome)*.

5. Rekomendasi.

Sehubungan dengan hasil evaluasi diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar :

a. Mengatur mekanisme bagian yang bertanggungjawab melakukan monitoring kinerja secara periodik.

b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat dijadikan dasar pengajuan dan pengaloksian anggaran ke Bappeda.

c. Perjanjian Kinerja yang ditandatangi dapat dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang berkinerja dan sebagai dasar *reward.*

d. Rencana aksi yang disusun dapat memberikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan untuk dapat dijadikan alasan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan sebagai bentuk tindakan nyata pencapaian target kinerja.

e. Melakukan perbaiakan atas SOP yang disusun dengan menginformasikan mekanisme terkait jika terjadi kesalahan/ketidaksesuain data dan siapa yang bertanggungjawab atas verifikasi dan validasi data pengukuran kinerja.

f. Capaian kinerja dimanfaatkan sebagai acuan untuk memberikan *reward atau punishment,* dan dijadikan dasar promosi atau kenaikan/penurunan pangkangkat.

g. Menyajikan/mengungkapkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada laporan kinerja.

h. Laporan kinerja menyajikan/mengungkapkan capaian kinerja jangka menengah yang dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja untuk mencapai kinerja organisasi.

i. hasil evaluasi atas rencana aksi untuk setiap periode harus dimintakan komitmen (persetujuan untuk ditindaklanjuti) dari pihak terkait, serta atasan yang bersangkutan melakukan pantauan sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda.

j. Hasil evalusi program dapat memberikan informasi/rekomendasi apakah perencanaan kinerja yang dilaksanakan membutuhkan perbaikan program atau tidak.

k. Hasil evaluasi rencana aksi dapat menginformasikan perbaikan setiap periodenya dan menunjukkan evaluasi rencana aksi yang telah ditindaklanjuti.

l. Meningkatkan capaian kinerja

Demikian hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 dan laporan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh secara nyata di lapangan selama pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatan dan norma pengawasan umum yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Terhadap permasalahan yang telah disampaikan di atas, kami meminta tanggapan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan tanggal **30 Juli 2020,** dan Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menyetujui,
Kepala Badan Kesbangpol
Kab. Kotawaringin Barat

MARWOTO,SIP
NIP. 19640428 198603 1 007

Pengendali Teknis
Evaluasi SAKIP,
Tahun Anggaran.2020,

Drs. EKA TAURUS SUSANTO
NIP. 19680517 199303 1 009

Mengetahui
Penanggungjawab
Evaluasi SAKIP TA. 2020

AGUS SUPARJI, SH., MH
NIP. 19600822 198603 1 017

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	85,42%	25,63
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	86,25%	8,63
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	100,00%	2,00
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	87,50%	4,38
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah ***berorientasi hasil***		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	85,00%	17,00
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00
5	Sasaran telah ***berorientasi hasil***		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00

10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
c.	**IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)**	**6,00**	**50,00%**	**3,00**
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		C	0,50
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		C	0,50
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0,50
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		**25,00**	**75,00%**	**18,75**
I.	**PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)**	**5,00**	**93,75%**	**4,69**
1	Telah terdapat *indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal*		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0,75
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
II.	**KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)**	**12,50**	**77,50%**	**9,69**
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah ***cukup untuk mengukur*** kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
III.	**IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)**	**7,50**	**58,33%**	**4,38**
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50

17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*		C	0,50
19	IKU telah ***direviu secara berkala***		B	0,75
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		**15,00**	**79,07%**	**11,86**
I.	**PEMENUHAN PELAPORAN (3%)**	**3,00**	**100,00%**	**3,00**
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
II.	**PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)**	**7,50**	**76,14%**	**5,71**
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75
8	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan		B	0,75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75
III.	**PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)**	**4,50**	**70,00%**	**3,15**
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan ***telah digunakan dalam perbaikan perencanaan***		B	0,75
14	Informasi yang disajikan telah ***digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi***		B	0,75
15	Informasi yang disajikan ***telah digunakan untuk peningkatan kinerja***		C	0,50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		**10,00**	**52,85%**	**5,29**
I.	**PEMENUHAN EVALUASI (2%)**	**2,00**	**79,25%**	**1,59**
1	***Terdapat pemantauan mengenai kemajuan*** pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
2	***Evaluasi program*** telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,67
4	*Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan*		C	0,50
II.	**KUALITAS EVALUASI (5%)**	**5,00**	**51,50%**	**2,58**
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50

8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,34
III.	**PEMANFAATAN EVALUASI (3%)**	**3,00**	**37,50%**	**1,13**
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0,50
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0,25
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		**20,00**	**47,81%**	**9,56**
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	**7,50**	**60,00%**	**4,50**
1	Target dapat dicapai		B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	**12,50**	**101,25%**	**5,06**
4	Target dapat dicapai			0,75
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,13
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			1,31
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			1,88
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		**100,00**	**0,7108**	**71,08**